



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah maka Penyelenggaraan Otonomi Daerah dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah.

Pemberian kewenangan yang luas kepada daerah memerlukan koordinasi dan pengaturan untuk lebih mengharmonisasikan dan menyelaraskan pembangunan baik pembangunan daerah maupun antar daerah yang penjabarannya diatur dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Hal yang tidak dapat dipisahkan dari paradigma pemerintahan yaitu pembangunan yang menekankan pada peningkatan keterlibatan antara stakeholder dalam penyusunan perencanaan pembangunan yang memiliki makna aspiratif/bottom-up yang tinggi dalam kehidupan demokrasi tanpa terlepas dari aspek efisiensi, efektifitas dan keberlanjutan.

Rencana Kerja (Renja) SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Penyusunan rancangan Renja SKPD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD.

Penyusunan Rencana Kerja SKPD, merupakan bentuk pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-Undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) untuk periode tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD, serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

Sebagai aspirasi dalam mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan maka Dinas Sosial Kabupaten Humbang Hasundutan menjabarkan Visi dan Misi tersebut ke dalam Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2018. Rencana Kerja ini menggambarkan Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh jajaran Dinas Sosial Kabupaten Humbang Hasundutan yang pada akhirnya diterjemahkan sebagai rencana Program dan Kegiatan untuk Tahun 2019.



1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dalam menyusun RENJA SKPD Dinas Sosial Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2018 ini merupakan peraturan perundang-undangan yang menjiwai setiap aktivitas yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial dan penyusunan dokumen-dokumen yang terkait dengan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Peraturan-peraturan tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 ayat 2 dan Pasal 34;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3039).
3. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
5. Undang-undang Nomor : 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan Di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4272).
6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008.
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
10. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis;
12. Peraturan Pemerintah RI Nomor : 42 Tahun 1981 tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi Fakir Miskin.
13. Peraturan Pemerintah RI Nomor : 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat.
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman, Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan



Daerah Kabupaten / Kota.

16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
18. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019.
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
20. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
21. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan.
22. Peraturan Daerah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Humbang Hasundutan;

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1. Maksud

Maksud penyusunan RENJA SKPD ini adalah untuk memberikan arah dan gambaran kebijakan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Humbang Hasundutan selama Tahun 2018.

1.3.2. Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Tahunan SKPD (RENJA SKPD) inilah adalah efektifitas dan efisiensi kebijakan program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan khususnya DINAS SOSIAL sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi yang diembannya.

1.3.3. Tugas Pokok dan fungsi

Tugas Pokok Dinas Sosial Kabupaten Humbang Hasundutan adalah sebagai berikut:

- 1.** Penyusunan Renstra, RKA, dan DPA Dinas Sosial
- 2.** Pelaksanaan DPA Dinas Sosial
- 3.** Perumusan kebijakan di bidang sosial



4. Pelaksanaan kebijakan di bidang sosial
5. Penyelenggaraan pembangunan di bidang kesejahteraan sosial
6. Pelaksanaan pelayanan sosial
7. Penyelenggaraan bantuan sosial
8. Penyelenggaraan jaminan dan perlindungan sosial
9. Penyelenggaraan rehabilitasi sosial
10. Penyelenggaraan penanggulangan kemiskinan
11. Penyelenggaraan pemberdayaan sosial
12. Pelaksanaan tugas tugas dekonsentrasi bidang sosial
13. Pelaksanaan penanganan PMKS
14. Penyusunan peta rawan sosial
15. Pengelolaan kepegawaian pada Dinas sosial
16. Pengelolaan keuangan dinas Sosial
17. Pengelolaan ketatausahaan dinas Sosial
18. Pengelolaan perlengkapan dan kerumahtanggaan sosial
19. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan fungsinya
20. Pelaporan dan pertanggungjawaban tugas dan fungsi dinas sosial

20.1.1. Perencanaan Partisipatif

Perencanaan Partisipatif sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dengan gambaran sebagai berikut:

1. Setiap Daerah Menyusun Renstra SKPD yang memuat Rencana Program yang Berorientasi Kepada Pelayanan Publik.
2. Renstra SKPD disusun melalui mekanisme perencanaan Partisipatif dengan Stakeholder masing-masing Unit Kerja, dengan menggunakan RPJM Daerah sebagai acuannya.
3. Renstra SKPD dituangkan dalam Renja SKPD dan digunakan sebagai landasan penyusunan RKPD melalui forum musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah.
4. Program dan Kegiatan disusun sesuai dengan Nomenklatur Fungsi dan Sub Fungsi.

20.1.2. Sistematika Penulisan

Renja ini disusun dengan sistematika sebagai berikut.



BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. LATAR BELAKANG
- 1.2. LANDASAN HUKUM
- 1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

- 2.1. ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD
- 2.2. ISU-ISU PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD
- 2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD
- 2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL
- 3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA SKPD
- 3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

BAB IV PENUTUP

- A. KESIMPULAN
- B. SARAN



BAB II

EVALUASI RENJA SKPD TAHUN 2017

Pada bab ini dijelaskan kajian (review) mengenai pelaksanaan Renja SKPD tahun 2016. Kajian ini kemudian dibandingkan dengan pencapaian target Renstra Dinas Sosial Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2016-2021 untuk mengetahui perkembangan realisasi target yang telah ditetapkan.

Sesuai dengan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2016-2021 bahwa terdapat 3 (tiga) program yang telah ditetapkan dalam Renstra tersebut, ada 4 kegiatan yang berhasil direalisasikan sampai 100% keuangannya pada tahun 2016. Dari perspektif Renstra, tingkat capaian masih cukup tinggi dengan rata-rata tingkat capaian 98%.

Dalam konteks kegiatan, dari sejumlah kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Sosial Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2016-2021, sebagian besar belum dapat direalisasikan sampai 100% pada tahun 2016. Beberapa kegiatan tidak tertampung pada APBD Kabupaten Humbang Hasundutan T.A. 2016. Hal ini disebabkan karena adanya perubahan renstra yang dilakukan untuk penyesuaian terhadap SPM secara Nasional.

Pada tahun 2016 untuk mencapai tujuan program di atas, Dinas Sosial telah melaksanakan kegiatan pada bidang urusan Sosial sebanyak 8 Kegiatan, yaitu:

1. Pembinaan Operasional Program Keluarga Harapan (PKH);
2. Monitoring dan Operasional Penanggulangan Bencana;
3. Penanganan Mayat Terlantar;
4. Pembinaan dan Pemberian Bantuan kepada Lanjut Usia (Lansia) Non Produktif
5. Peningkatan Peran Aktif Karang Taruna melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE);
6. Pembinaan Taruna Siaga Bencana (TAGANA).
7. Pembinaan dan Operasional Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)
8. Lomba Paduan Suara Lansia

Satu Kegiatan yang tidak terlaksana adalah kegiatan penanganan Mayat terlantar tidak dilaksanakan karena tidak ditemukan mayat yang terlantar di Wilayah Kabupaten Humbang Hasundutan, evaluasi renja 2017 (terlampir).

2.2. ISU-ISU PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD

Dari Analisa Kinerja Pelayanan SKPD dapat dilihat bahwa kinerja pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Humbang Hasundutan belum memenuhi target sesuai dengan



yang diharapkan, khususnya pada tahun 2016. Hal ini disebabkan faktor-faktor antara lain :

1. Lemahnya aspek SDM Dinas Sosial Kabupaten Humbang Hasundutan dalam hal kuantitas dan kualitas.
2. Luasnya daerah layanan Dinas Sosial Kabupaten Humbang Hasundutan.
3. Kurangnya sarana dan prasarana pendukung.
4. Kurangnya data di bidang sosial yang lengkap dan akurat.
5. Keterbatasan anggaran terkait pelaksanaan program/kegiatan Dinas Sosial.

Permasalahan ini perlu segera diatasi mengingat tantangan yang dihadapi pemerintah di masa yang akan datang semakin meningkat, antara lain :

1. Kurangnya pemahaman para pemangku kepentingan mengenai urgensi isu-isu sosial dan ketenagakerjaan.
2. Buruknya kondisi kesejahteraan sosial masyarakat.
3. Kondisi perekonomian nasional yang belum pulih sepenuhnya.
4. Kondisi perekonomian dunia yang mengarah kepada krisis global.
5. Meningkatnya angka kemiskinan, pengangguran dan penyandang masalah kesejahteraan sosial sebagai akibat memburuknya situasi ekonomi.

Seluruh permasalahan dan tantangan ini dapat diatasi dengan mengoptimalkan seluruh potensi yang ada serta memanfaatkan peluang yang tersedia, misalnya:

1. Adanya regulasi di daerah tentang kesejahteraan sosial.
2. Adanya instansi-instansi pemerintah dan lembaga-lembaga masyarakat yang dapat dijadikan mitra dalam memecahkan permasalahan sosial, khususnya di Kabupaten Humbang Hasundutan.
3. Meningkatnya Teknologi Informasi dan Komunikasi yang dapat dimanfaatkan untuk menjangkau informasi seluas-luasnya dari berbagai sumber terkait penanganan masalah di bidang sosial.
4. Adanya kesempatan pendidikan, pelatihan, bimbingan teknis, penyuluhan dan lain-lain yang disediakan oleh berbagai instansi dan organisasi masyarakat.
5. Tersedianya dana-dana tambahan yang bersumber dari level pemerintahan yang lebih tinggi.
6. Adanya partisipasi dan kepedulian masyarakat melalui berbagai forum untuk lebih terlibat dalam program pemerintah.

Peluang-peluang ini perlu didiberdayakan agar program/kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat dipenuhi secara optimal. Hal ini telah coba diupayakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Humbang Hasundutan sepanjang



tahun 2016, terbukti dengan terselenggaranya beberapa kegiatan hingga tingkat capaian 100%. Kondisi ini dapat dicapai berkat koordinasi yang baik dengan berbagai pemangku kepentingan di samping kerja keras para staf Dinas Sosial untuk mengoptimalkan setiap sumber daya yang ada. Kondisi ini perlu terus dipertahankan, bahkan ditingkatkan, agar kinerja yang ditargetkan dapat dipenuhi semaksimal mungkin.

2.3. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Berdasarkan tinjauan terhadap rancangan awal RKPD Kabupaten Humbang Hasundutan tahun 2016 dengan mempedomani RPJP 2005, maka dalam penyusunan rancangan awal hingga penetapan rancangan awal tidak terlalu banyak program maupun kegiatan yang tercantum dalam Renja Dinas Sosial Kabupaten Humbang Hasundutan sudah diakomodir sejak Rancangan awal RKPD disusun. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table terlampir.

2.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Untuk Tahun Anggaran 2017, sejumlah program dan kegiatan telah diusulkan oleh berbagai pemangku kepentingan, seperti masyarakat, lembaga-lembaga sosial, LSM serta instansi pemerintah lainnya. Sebagian besar usulan tersebut memiliki relevansi dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Humbang Hasundutan dan program/kegiatan ini dapat ditetapkan di dalam Renstra Tahun 2016-2021. Dengan demikian perencanaan terhadap usulan-usulan tersebut dapat diprogramkan Dinas Sosial Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2017. (Tabel Terlampir).



BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Untuk mewujudkan visi dan misi Dinas Sosial Kabupaten Humbang Hasundutan sebagaimana diuraikan dalam Renstra Tahun 2016-2021, yaitu MEWUJUDKAN KEMANDIRIAN DAN PELAYANAN PRIMA KEPADA MASYARAKAT DEMI MENUJU HUMBANG HASUNDUTAN YANG HEBAT DAN BERMENTALITAS UNGGUL, maka pegawai Dinas Sosial harus melakukan tugas dan fungsinya masing-masing sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kebijakan Nasional yang telah dilakukan oleh Pemerintah sudah sangat baik, misalnya dengan memberikan bantuan kepada masyarakat melalui Program Keluarga Harapan (PKH), dimana secara tidak langsung Pemerintah juga merekrut karyawan dari masyarakat Humbang Hasundutan sehingga mengurangi pengangguran dan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Dan masih banyak lagi kebijakan nasional yang mendukung kegiatan Dinas Sosial dalam melaksanakan tugas dan pokok serta fungsi Pegawai Dinas Sosial.

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA SKPD

Program/kegiatan yang dirumuskan di bidang sosial secara umum bertujuan untuk "Meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan sosial melalui pemberdayaan potensi sumber kesejahteraan sosial". Secara khusus program/kegiatan tersebut bertujuan untuk :

- Meningkatkan taraf hidup kesejahteraan keluarga miskin.
- Mewujudkan kemandirian usaha sosial ekonomi keluarga miskin.
- Meningkatkan peran strategis Lembaga Keuangan Mikro agar mampu memberikan pelayanan kesejahteraan sosial bagi kelompok usaha bersama (KUBE) di lingkungannya.
- Meningkatkan kepedulian dan tanggung jawab sosial masyarakat dan dunia usaha dalam program penanggulangan kemiskinan.
- Meningkatkan peran program pembinaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
- Meningkatkan kualitas manajemen pelayanan kesejahteraan sosial



terhadap keluarga miskin.

Sasaran program/kegiatan tersebut adalah sebagai berikut.

1. Keluarga fakir miskin yang tidak mempunyai sumber mata pencaharian atau mempunyai mata pencaharian namun tidak cukup memenuhi kebutuhan dasar (pangan, sandang, papan, pendidikan dan kesehatan).
2. Masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), antara lain:
 - (a) anak balita terlantar dan anak terlantar,
 - (b) anak cacat, penyandang cacat dan penyandang cacat bekas kronis,
 - (c) wanita rawan sosial,
 - (d) lansia terlantar dan lansia korban tindak kekerasan,
 - (e) keluarga rentan, keluarga bermasalah psikologis,
 - (f) fakir miskin dan pemilik rumah tidak layak huni,
 - (g) anak nakal, anak jalanan dan anak korban tindak kekerasan,
 - (h) tuna susila, gelandangan dan pengemis,
 - (i) bekas narapidana, penyalahgunaan narkoba dan HIV,
 - (j) korban bencana alam dan bencana sosial,
 - (k) masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana,
 - (l) Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan pekerja migran terlantar.

3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

Penyusunan program/kegiatan sebagai Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2017 dilakukan dengan memperhatikan beberapa faktor sebagai berikut:

1. Kebutuhan masyarakat Kabupaten Humbang Hasundutan, khususnya yang menjadi sasaran program/kegiatan Dinas Sosial.
2. Masukan-masukan dari para pemangku kepentingan di Kabupaten Humbang Hasundutan.
3. Penjelasan dan rincian program/kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renstra 2016-2021.
4. Tingkat capaian kinerja Dinas Sosial sampai dengan 2018.



A. Pencapaian Visi dan Misi Bupati

Guna mewujudkan Humbang Hasundutan yang berkelas nasional dalam hal kemakmuran, tata kelola, mentalitas unggul dalam pemberdayaan masyarakat, pendayagunaan potensi alam dan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan merata.

Dinas Sosial Kabupaten Humbang Hasundutan memiliki Visi ‘mewujudkan kesejahteraan sosial menuju Humbang Hasundutan yang hebat dan bermentalitas unggul bagi masyarakat serta hubungan kerja yang harmonis dan terlindungi’, dengan misi sebagai berikut :

1. Mempersiapkan data yang akurat tentang Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.
2. Meningkatkan koordinasi dan konsultasi dengan lintas sektoral dan lintas pemangku kepentingan.
3. Meningkatkan pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.
4. Meningkatkan Kualitas SDM Dinas Sosial.
5. Memfungsikan Petugas-petugas Sosial yang ada (TKSK, PMS, Tagana, Pendamping PKH).

B. Pencapaian SDG’S

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pencapaian **SDG’S** di sektor Sosial, adalah;

1. Melaksanakan Program Keluarga Harapan untuk Keluarga Sangat Miskin (KSM);
2. Memberdayakan masyarakat miskin melalui KUBE;

C. Pengentasan Kemiskinan

Upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan di Indonesia khususnya di Kabupaten Humbang Hasundutan sudah maksimal, walaupun perlu kerja keras lagi untuk mendapatkan taraf hidup masyarakat yang adil dan makmur.

Kesadaran masyarakat juga harus ditingkatkan untuk keluar dari kemiskinan, karena motivasi dari diri sendiri jugalah yang menjauhkan masyarakat dari kemiskinan. Seperti yang kita lihat dari kegiatan Dinas Sosial yang memberikan Rekomendasi BPJS, ada banyak masyarakat yang miskin yang membutuhkan pengobatan gratis dari pemerintah. Jika masyarakat yang mendapat bantuan Rekomendasi BPJS memang benar-benar miskin, itu sah-sah saja, tetapi bila masyarakat yang mendapat bantuan bukan dari keluarga susah,



itu yang menjadi dilema bagi masyarakat. Untuk itu diperlukan kerjasama yang baik dengan pemerintah setempat yaitu pemerintah yang terkecil, misalnya kepala desa. Sebaiknya Kepala Desa benar-benar mengenal warganya agar tidak memberikan Surat Keterangan Tidak Mampu pada yang tidak layak menerimanya.

D. Program dan Kegiatan Tahun 2019

Ada 7 program yang terdiri dari 37 kegiatan sosial yang akan dilaksanakan Dinas Sosial Kabupaten Humbang Hasundutan pada tahun 2019 (table terlampir). Pihak-pihak yang terkait diharapkan dapat membantu terlaksananya program dan kegiatan tersebut, agar masyarakat Humbang Hasundutan benar-benar merasakan campur tangan pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan.



BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja (RENJA) ini merupakan pedoman kepada semua aparatur di lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Humbang Hasundutan dalam melaksanakan kegiatan melalui kerjasama terpadu dengan instansi terkait, Lembaga Swadaya Masyarakat, Pengusaha dan Masyarakat. Demi tercapainya target kinerja yang telah ditetapkan, dibutuhkan kerja keras dan kerja sama semua pihak, khususnya para pemangku kepentingan di bidang sosial. Untuk mengantisipasi minimnya dana yang tersedia dari APBD Kabupaten Humbang Hasundutan, dibutuhkan usaha aktif untuk mencari informasi terkait sumber-sumber dana dari level pemerintahan yang lebih tinggi. Selain itu, kemitraan dengan berbagai pihak, seperti pihak swasta dan organisasi masyarakat lainnya, dapat menyediakan solusi demi terlaksananya seluruh program/kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Humbang Hasundutan.

Demikian Rencana Kerja (RENJA SKPD) Tahun 2019 Dinas Sosial Kabupaten Humbang Hasundutan ini disampaikan sebagai acuan untuk menentukan arah kebijakan dalam penyusunan Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Humbang Hasundutan untuk Tahun Anggaran 2017.

Atas segala perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terimakasih.

Doloksanggul, September 2018

**KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN,**

**PAIMAN B. PURBA, S.Sos
PEMBINA Tk.I
NIP. 197111291992031009**





LAMPIRAN BERITA ACARA PENYELARASAN RKPD TAHUN 2019
OPD DINAS SOSIAL KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN

| NO | E-PLANNING | | SETELAH PENYELARASAN | | | KETERANGAN | |
|----|---|----------------|---|---|--------|------------|--|
| | URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN | PAGU INDIKATIF | URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/Kegiatan | INDIKATOR KINERJA | | | PAGU INDIKATIF |
| | | | | Tolok Ukur | Target | | |
| 1 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Angka Indeks Kepuasan Aparatur Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran (%) | 80 | | Penambahan indikator kinerja pogram |
| 1 | Penyediaan Jasa Komunikasi , sumber daya air, listrik | 12.000.000 | Penyediaan Jasa Komunikasi , sumber daya air, listrik | Jumlah jenis jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang terpenuhi (jasa) | 2 | 12.000.000 | Perubahan tolak ukur dan target Kegiatan |
| 2 | Penyediaan jasa administrasi keuangan | 9.554.000 | Penyediaan jasa administrasi keuangan | Jumlah Dokumen laporan KeuanganPerangkat Daerah (Dokumen) | 6 | 9.554.000 | Perubahan tolak ukur dan target Kegiatan |
| 3 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | 10.216.000 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | jumlah jenis penyediaan jasa kebersihan kantor yang terpenuhi (jasa) | 2 | 10.216.000 | Perubahan tolak ukur dan target Kegiatan |



DINAS SOSIAL KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN

| | | | | | | | |
|----|--|-------------|--|---|-----|-------------|--|
| 4 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | 40.214.236 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Jumlah penyediaan alat tulis kantor yang terpenuhi (item) | 50 | 40.214.236 | Perubahan tolak ukur dan target Kegiatan |
| 5 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | 25.255.200 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah penyediaan barang cetak dan penggandaan yang terpenuhi (item) | 8 | 25.255.200 | Perubahan tolak ukur dan target Kegiatan |
| 6 | Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | 7.122.000 | Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Jumlah penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang terpenuhi (item) | 7 | 7.122.000 | Perubahan tolak ukur dan target Kegiatan |
| 7 | Penyediaan makan dan minuman | 41.595.000 | Penyediaan makan dan minuman | Jumlah penyediaan makanan dan minuman yang terpenuhi (kebutuhan) | 3 | 41.595.000 | Perubahan tolak ukur dan target Kegiatan |
| 8 | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | 326.906.382 | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | Jumlah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah yang terpenuhi (kali) | 50 | 326.906.382 | Perubahan tolak ukur dan target Kegiatan |
| 9 | Rapat-rapat koordinasi dalam daerah | 104.950.000 | Rapat-rapat koordinasi dalam daerah | Jumlah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang terpenuhi (kali) | 100 | 104.950.000 | Perubahan tolak ukur dan target Kegiatan |
| 10 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 12.705.000 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | jumlah penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang terpenuhi (bahan bacaan) | 1 | 12.705.000 | Perubahan tolak ukur dan target Kegiatan |



DINAS SOSIAL KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN

| | II. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR | | II. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR | Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi (%) | 80 | | Penambahan indikator kinerja pogram |
|----|--|------------|---|---|----|------------|--|
| 11 | Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor | 50.000.000 | Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor | Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor (unit) | 1 | 50.000.000 | Perubahan tolak ukur dan target Kegiatan |
| 12 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | 20.000.000 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | Jumlah gedung/kantor yang dipelihara (unit) | 1 | 20.000.000 | Perubahan tolak ukur dan target Kegiatan |
| 13 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | 73.498.605 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara (unit) | 3 | 73.498.605 | Perubahan tolak ukur dan target Kegiatan |
| 14 | Pemeliharaan Rutin/Berkala peralatan gedung kantor | 4.600.000 | Pemeliharaan Rutin/Berkala peralatan gedung kantor | Jumlah peralatan gedung/kantor yang dipelihara (unit) | 10 | 4.600.000 | Perubahan tolak ukur dan target Kegiatan |
| | III. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR | | III. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR | Cakupan Aparatur Perangkat Daerah memiliki kompetensi dibidangnya (%) | 80 | | Penambahan indikator kinerja pogram |
| 15 | Jumlah Aparatur yang mengikuti Diklat/Bimtek (orang) | 52.500.000 | Jumlah Aparatur yang mengikuti Diklat/Bimtek (orang) | Jumlah Aparatur yang mengikuti Diklat/Bimtek (orang) | 8 | 52.500.000 | Perubahan tolak ukur dan target Kegiatan |



DINAS SOSIAL KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN

| | IV. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan (PMKS) Lainnya | | IV. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan (PMKS) Lainnya | Persentase PMKS yang mampu hidup mandiri | 80 | | Penambahan Indikator Kinerja Program |
|--|--|------------|--|--|----|------------|---|
| | Monitoring Evaluasi dan Pengendalian Bidang Pemberdayaan dan Bantuan Sosial, Tagana, PKH, KUBE FM, Bencana dan Karang Taruna | 67.750.000 | - | - | - | - | Dihapus |
| | Monitoring dan Pengendalian Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial | 41.501.200 | - | - | - | - | Dihapus |
| | Pelaporan Perubahan Data Fakir Miskin | 52.400.000 | Pelaporan Perubahan Data Fakir Miskin | Persentase Data Fakir Miskin yang tersedia | 80 | 52.400.000 | Perubahan tolak ukur dan target Kegiatan |
| | - | - | Koordinasi distribusi Rastra | Persentase Masyarakat yang menerima manfaat Rastra | 80 | 58.674.000 | Perubahan tolak ukur dan target Kegiatan |
| | Pemberian Bantuan Sembako bagi Keluarga yang Terkena Musibah Bencana | 33.001.625 | - | - | - | - | Pindah ke Program Penceahan dan Penanggulangan bencana sosial |
| | V. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial | | V. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial | Persentase Penyandang Diasabilitas yang terpenuhi sebagian Kebutuhan Dasarnya dan Persentase Lansia yang terpenuhi sebagian Kebutuhan | 80 | | Perubahan Indikator Kinerja Program |



DINAS SOSIAL KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN

| | | | | Dasarnya | | | |
|--|--|-------------|--|--|-----|-------------|--|
| | Rehabilitas Penyandang Cacat Fisik Untuk Masyarakat Kurang Mampu di Kabupaten Humbang Hasundutan | 84.587.800 | Rehabilitas Penyandang Cacat Fisik Untuk Masyarakat Kurang Mampu di Kabupaten Humbang Hasundutan | Jumlah Penyandang Cacat Fisik yang mampu hidup mandiri (orang) setelah memperoleh Rehabilitasi | 60 | 101.067.800 | Perubahan tolak ukur, target Kegiatan dan Perubahan Pagu |
| | Penertiban dan Pengantaran Terhadap Penyandang Disabilitas jiwa (ODGJ) | 96.377.000 | Penertiban dan Pengantaran Terhadap Penyandang Disabilitas jiwa (ODGJ) | Jumlah Penyandang Cacat yang pulih/normal setelah rehabilitasi (orang) | 15 | 112.857.000 | Perubahan tolak ukur dan target Kegiatan |
| | Penanganan Mayat Terlantar | 7.680.000 | Penanganan Mayat Terlantar | Persentase Mayat Terlantar yang tertangani | 100 | 7.680.000 | Perubahan tolak ukur, target Kegiatan dan Perubahan Pagu |
| | Lomba Paduan Suara Lansia | 96.826.000 | Pembinaan Lansia Kabupaten Humbang Hasundutan | Jumlah Lansia yang dibina | 922 | 410.294.435 | Digabung |
| | Bedah Kamar Lansia Non Potensial | 96.187.435 | | | | | |
| | Pembinaan Kelompok Lansia Potensial dengan pemberian Baju Olah Raga | 184.321.000 | | | | | |
| | Pembinaan Lansia (LVRI) Kab. Humbang Humbang Hasundutan dengan memberikan bantuan baju batik | 54.129.700 | - | - | - | - | Dihapus |



DINAS SOSIAL KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN

| | | | | | | | |
|----|---|-------------|---|--|----|-------------|--|
| | | | Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Disabilitas Fisik (Perkiosan) | Jumlah Penyandang Cacat Fisik yang mandiri setelah mendapat UEP (orang) | 25 | 73.981.000 | Perubahan tolak ukur, target Kegiatan dan Perubahan Pagu |
| | VI. Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial | | VI. Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial | Persentase Keaktifan PSKS dalam melaksanakan Tugasnya | 80 | | Perubahan tolak ukur dan target Kegiatan |
| 28 | Pembinaan Kelembagaan Karang Taruna | 52.568.000 | Pembinaan Kelembagaan Karang Taruna | Jumlah Karang Taruna yang dibina (Lembaga) | 1 | 60.318.000 | Perubahan tolak ukur , target Kegiatan dan Perubahan Pagu |
| | Pembinaan Taruna Siaga Bencana | 96.847.000 | - | - | - | - | Pindah ke Program Pencegahan dan Penanggulangan Bencana Sosial |
| 29 | Pembinaan dan Operasional Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan dan Koordinator TKS Kabupaten | 90.666.000 | Pembinaan dan Operasional Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan dan Koordinator TKS Kabupaten | Jumlah TKS yang dibina (orang) | 11 | 102.730.500 | Perubahan tolak ukur , target Kegiatan dan Perubahan Pagu |
| | VII. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial | | VII. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial | Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang mandiri setelah mendapat jaminan sosial | 80 | | Perubahan tolak ukur dan target Kegiatan |
| | Rapat Koordinasi Program Keluarga Harapan (PKH) antar Leading Sector | 24.351.200 | Pembinaan dan Operasional Program Keluarga Harapan | Jumlah PKH yang dibina (orang) | 42 | 220.967.350 | Digabung |
| | Pembinaan dan Operasional Program Keluarga Harapan | 161.482.000 | | | | | |



DINAS SOSIAL KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN

| | | | | | | | |
|--|---|----------------------|--|---|------------|----------------------|---|
| | Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Disabilitas Fisik (Perkiosan) | 57.501.000 | - | - | - | - | Pindah ke Program Bidang Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial |
| | Koordinasi distribusi Rastra | 58.674.000 | - | - | - | - | Pindah Ke Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan (PMKS) Lainnya |
| | - | - | VIII. Progam Pencegahan dan Penganggulangan Bencana Sosial | Persentase Korban Bencana yang memperoleh bantuan sesuai SOP | 100 | | Penambahan Program |
| | - | - | Pemberian Bantuan Sembako bagi Keluarga yang Terkena Musibah Bencana | Persentase penanggulangan bencana sosial | 100 | 49.033.875 | Perubahan tolak ukur, target Kegiatan, Perubahan Pagu dan Pindah Program |
| | - | - | Pembinaan Taruna Siaga Bencana | Jumlah Taruna Siaga Bencana yang dibina (orang) | 15 | 106.847.000 | Perubahan tolak ukur, target Kegiatan, Perubahan Pagu dan Pindah Program |
| | Jumlah E-Planning | 2.147.967.383 | Jumlah Hasil Penyelarasan | | | 2.147.967.383 | |

Disetujui/Disepakati Oleh :

I Kepala Dinas
Sosial
Kabupaten
Humbang
Hasundutan

Paiman B. Purba,S.Sos

Doloksanggul,

2018



DINAS SOSIAL KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN

II Tim SAKIP Kepala Bappeda
Kabag Organisasi
-
III TAPD Penanggung Jawab

1 ...
2 ...
3 ...